

Perempuan Bali dalam Pengelolaan Pariwisata di Bali *Balinese Women in Tourism Management in Bali*

Dewa Putu Oka Prasiasa¹, Yeyen Komalasari², Dewa Ayu Diyah Sri Widari³

¹⁻²*Universitas Dhyana Pura, Badung – Bali*

³*Akademi Pariwisata Denpasar*

*Email: dewaputuokaprasiasa@undhirabali.ac.id

Abstract

Women are often positioned as marginal people in various fields of life, including the position of Balinese women in managing tourism in Bali. This article aims to analyze the position of Balinese women in tourism management in Bali. This research is a literature study with a qualitative descriptive analysis. This research found that Balinese women are very enthusiastic as homeworkers because they are related to domestic activities. These symptoms are related to the ideological superstructure and work ethic. This study also found that social structure and material infrastructure strengthen the work ethic. Balinese women think that work is *yadnya*, needs to be carried out and practiced to improve self-quality. Even though Balinese women experience injustice in the management of tourism in Bali, they are still eager to earn a living.

Keywords: *injustice, gender, cultural studies, ideology, yadnya*

Abstrak

Perempuan sering diposisikan sebagai kaum marginal dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk posisi perempuan Bali dalam pengelolaan pariwisata di Bali. Artikel ini bertujuan menganalisis posisi perempuan Bali dalam pengelolaan pariwisata di Bali. Penelitian ini merupakan studi literatur dengan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan perempuan Bali amat bergairah sebagai pekerja rumahan karena berkaitan dengan kegiatan domestik. Gejala ini terkait dengan superstruktur ideologi dan etos kerja. Penelitian ini juga menemukan struktur sosial dan infrastruktur material memberikan penguatan terhadap etos kerja. Perempuan Bali menganggap kerja adalah *yadnya*, perlu dilaksanakan serta diamalkan untuk peningkatan kualitas diri. Meskipun perempuan Bali mengalami ketidakadilan dalam pengelolaan pariwisata di Bali, namun mereka tetap bersemangat untuk memperoleh nafkah.

Kata Kunci: *ketidakadilan, gender, cultural studies, ideologi, yadnya*

A. Pendahuluan

Perempuan selama ini sering diposisikan sebagai kaum marginal dalam berbagai bidang kehidupan. Posisi perempuan seperti itu juga dialami oleh perempuan Bali, baik secara akademik maupun ekonomi dalam kerangka pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini oleh Syafruddin dkk. (2020) dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah dan keterampilan yang terbatas memiliki implikasi terjadinya marginalisasi perempuan dalam kehidupan publik. Kondisi ini tentu saja memerlukan penanggulangan agar pemahaman terhadap berbagai aspek tentang kehidupan perempuan menjadi lebih luas, mendalam dan menyeluruh. Pemahaman itu dapat dipakai sebagai acuan untuk memberdayakan perempuan ke arah suatu kemajuan yang berbasiskan pada kebutuhan nyata dan budaya pada sebuah masyarakat.

Kajian-kajian terhadap perempuan Bali sudah banyak dilakukan antara lain oleh Cukier dkk., (1996) dan Yanthy (2016). Selanjutnya Couteau (1994) mengkaji pemikiran tokoh perempuan Bali kontemporer yaitu Ida Ayu Agung Mas. Menurutnya, secara ideal perempuan Bali setara dengan laki-laki. Namun dalam kenyataannya tidak demikian adanya, justru laki-laki yang lebih berkuasa serta hak dan gerak perempuan sangat dibatasi, sehingga menurut Andani (2017) dapat menyebabkan ketimpangan gender. Namun demikian, menurut Darmayanti dan Budarsa (2021) perempuan yang lebih banyak membantu perekonomian keluarga pada masa Pandemi Covid-19. Berikut disajikan jumlah penduduk di Provinsi Bali berdasarkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2022 seperti Tabel 1.

Tabel 1.
Proyeksi Jumlah Penduduk Bali Provinsi Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2022 (ribu jiwa)

| Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Laki-Laki | Jumah Penduduk Perempuan | T o t a l |
|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|
| Jembrana | 164,1 | 163,8 | 327,9 |
| Tabanan | 235,2 | 234,1 | 469,3 |
| Badung | 275,2 | 274,4 | 549,6 |
| Gianyar | 262,7 | 261,3 | 524 |
| Klungkung | 107,2 | 106,8 | 214 |
| Bangli | 134,5 | 132,6 | 267,1 |

| | | | |
|------------|---------|---------|---------|
| Karangasem | 259,0 | 252,3 | 511,3 |
| Buleleng | 414,8 | 410,4 | 825,2 |
| Denpasar | 367,0 | 359,9 | 726,9 |
| Bali | 2.219,7 | 2.195,6 | 4.415,3 |

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2023

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa 50,27% dari total penduduk Provinsi Bali pada tahun 2022 adalah laki-laki, sedangkan 49,73% adalah penduduk perempuan. Perbedaan jumlah penduduk berdasarkan gender tersebut sesungguhnya bukan masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Dalam kenyataannya, perbedaan gender ternyata melahirkan ketidakadilan terutama bagi perempuan, termasuk bagi perempuan Bali dalam pengelolaan pariwisata di Bali. Ketidakadilan yang menimpa perempuan Bali yang bekerja di sektor pariwisata antara lain berupa pembentukan stereotip atau pelabelan bahwa pekerja perempuan memiliki keterbatasan dalam kemampuan bekerja di bidang pengelolaan pariwisata, sedangkan menurut Syafruddin dkk. (2020) menyatakan pekerja perempuan di sektor pariwisata justru memiliki kemampuan serta mobilitas yang tinggi.

Secara umum ada beberapa bentuk ketidakadilan yang menimpa perempuan antara lain posisi perempuan yang sering tersubordinasi dan termarginalisasi, kekerasan (*violence*), permasalahan etos kerja, serta beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*) untuk perempuan. Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1993 Pasal 1 menyebutkan bahwa "kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi." Selain menghadapi ketidakadilan, Subadra (2008) menyatakan bahwa perempuan Bali di tempat kerjanya terkadang merasa tertindas dan tersisihkan, dan bahkan tidak berdaya sama sekali menghadapi tekanan kerja.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui etos kerja perempuan Bali, kekuasaan perempuan Bali dalam pengelolaan pariwisata di Bali, dan bentuk ketidakadilan terhadap perempuan Bali dalam pengelolaan pariwisata di Bali. Mengacu pada tujuan tersebut, penelitian ini perlu dilakukan untuk menemukan solusi yang tepat dalam rangka menjaga keberlanjutan peran serta keterlibatan perempuan Bali dalam pengelolaan pariwisata di Bali.

B. Metode

Kajian ini menggunakan model studi kepustakaan. Data diperoleh dari hasil-hasil penelitian dan referensi yang terkait dengan keterlibatan perempuan Bali dalam pengelolaan pariwisata di Bali. Menurut Snyder (2019) tinjauan pustaka dapat diperlakukan sebagai metodologi penelitian, dan oleh Onwueg dan Frels (2016) tinjauan pustaka dikenal sebagai *comprehensive literature review*. Sebagai sebuah *comprehensive literature review*, penelitian ini mengkaji hasil-hasil penelitian serta referensi yang relevan, untuk mendapatkan berbagai informasi dan data terkait etos kerja, kekuasaan serta ketidakadilan terhadap perempuan Bali dalam pengelolaan pariwisata di Bali. Selanjutnya data dan informasi tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dan diperbandingkan dengan teori, konsep serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk memperoleh simpulan dari penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Kajian terhadap gender selalu menempatkan perempuan sebagai acuan, oleh karena perlu memahami konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender. Kata seks (jenis kelamin) merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis serta melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan gender adalah semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lainnya (Fakih 1996) Misalnya, perempuan dikenal sebagai lemah

lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri-ciri atau sifat-sifat di atas dapat dipertukarkan, artinya ada juga laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Sedangkan Ratna (2005:224) mendefinisikan gender sebagai lawan seks, dan gender bersifat psikologis kultural, sebagai perbedaan antara *masculine-feminine*.

Dalam kerangka *cultural studies*, pembahasan tentang seks dan gender muncul sebagai akibat kondisi perempuan yang ter-subordinasi-kan atas kebudayaan, artinya kebudayaanlah yang menyebabkan perempuan dianggap sebagai memiliki kedudukan yang lebih rendah dengan laki-laki, dan bukan semata-mata karena kondisi biologis perempuan (Ratna 2005:224). Sementara itu menurut Rosaldo (1974:23) dan Moore (Moore 1994:10-11) mengatakan bahwa subordinasi perempuan itu tidak bersifat kultural, tetapi juga berakar dari pembagian kerja berdasarkan gender.

Meskipun perempuan tersubordinasi, menurut Karmilah (2013) pada pengembangan pariwisata di pedesaan (*rural tourism*), justru perempuan pedesaan memikul peran ganda, pemikul tanggung jawab kerja rumah tangga maupun membantu mencari penghasilan rumah tangga. Hal ini perlu ditekankan agar perempuan tidak terus tersubordinasi serta agar kebijakan dan pelaksanaan program-program kemampuan perempuan mempertimbangkan peran ganda perempuan, sehingga tidak menambah beban jauh di luar kapasitas perempuan saat ini. Berikut ini diuraikan etos kerja perempuan Bali, kekuasaan perempuan Bali dalam pengelolaan pariwisata, serta ketidakadilan terhadap perempuan Bali dalam pengelolaan pariwisata di Bali.

1. Etos Kerja Perempuan Bali

Perempuan Bali memiliki etos kerja yang baik serta termasuk pekerja keras (Artadi 1993). Gejala ini berkaitan dengan ideologi patriarki sebagaimana tercermin dari adanya sistem kekerabatan patrilineal pada masyarakat Bali. Sistem ini mengakibatkan perempuan yang telah menikah harus masuk dan tinggal di lingkungan kerabat suaminya. Bahkan yang tidak kalah pentingnya, ideologi patriarki mengakibatkan perempuan ter-subordinasi-kan oleh laki-laki

.....
ataupun suaminya. Kondisi ini mendorong perempuan bekerja keras agar eksistensinya dihargai oleh suami maupun lingkungan keluarganya. Dalam perspektif sistem ekonomi kapitalis, etos kerja berkaitan dengan pekerjaan yang dianggap bernilai tinggi dalam masyarakat dan mampu menghasilkan uang tunai. Uang tunai tersebut menurut Lury (1998) dan Pilliang (1998) adalah untuk memenuhi nafsu mereka untuk mengonsumsi aneka jasa dan barang yang persediaannya melimpah di pasar.

Perempuan Bali dikenal sebagai sosok yang kuat dan tangguh. Mereka mampu menjalani dan menjalankan berbagai peran dalam kehidupan adat, agama dan ekonomi. Sikap pekerja keras dan ketangguhan perempuan Bali merupakan warisan masa lalu dalam budaya agraris yang menjadi penopang kehidupan masyarakat Bali. Perempuan Bali juga memiliki sumber daya yang mampu mengantarkan mereka berada pada dua ranah yakni ranah domestik dan ranah publik. Mereka masih bisa berkarya di luar rumah dan mampu melaksanakan kewajibannya dalam keluarga, adat dan agama secara lebih luas. Keterlibatan perempuan Bali dalam dua ranah tersebut sejalan dengan Darmayanti dan Budarsa (2021) yang menyatakan bahwa peran perempuan sebagai dualisme kultural.

Kehadiran perempuan Bali sebagai penopang ekonomi selama Pandemi Covid-19 bukanlah sesuatu yang baru di Bali. Mereka tetap menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu di kedua wilayah. Sebagai istri mereka tetap melakukan aktivitas memasak, mencuci, bersih-bersih dan sebagainya. Sebagai seorang ibu mereka tetap mencurahkan perhatian kepada anak terlebih sekolah daring yang diterapkan menuntut mereka untuk tetap mendampingi anak dalam proses belajar. Kondisi ini membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap kehidupan para perempuan Bali, sehingga peran ganda tidak bisa dihindari. Peran ganda (*double burden*) menurut Michele (2015) sebagai konsekuensi yang harus diterima perempuan ketika memutuskan untuk terjun ke ranah publik. Kondisi ini mengantarkan perempuan pada posisi dualisme kultural yang harus mereka pikul. Dualisme kultural yang dimaksud terkait dengan peran tradisi

dan transisi perempuan. Peran tradisi adalah peranan perempuan dalam *domestic sphere* yang terkait dengan tugas dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga. Sementara peran transisi terkait dengan partisipasi perempuan dalam *public sphere* sebagai pekerja, anggota masyarakat dan sebagai manusia yang harus ikut mengisi pembangunan.

Dengan melihat keterlibatan perempuan Bali dalam pengelolaan pariwisata, hal ini sejalan dengan Karmilah (2013) bahwa peran ganda perempuan tidak hanya terjadi di bidang ekonomi dan sosial, tetapi juga terjadi di industri pariwisata yang saat ini merupakan andalan bagi pendapatan asing setelah sektor minyak dan gas. Hal ini juga berarti bahwa perempuan Bali sekaligus akan berkiprah pada dua ranah yaitu ranah domestik dan ranah publik. Keterlibatan pada kedua ranah tersebut memposisikan perempuan Bali sebagai perempuan dengan etos kerja tinggi. Antusiasme perempuan Bali terjun ke sektor publik untuk mencari nafkah dapat mengakibatkan sumbangan perempuan terhadap aset ekonomi rumah tangga mereka menjadi amat berarti. Hal ini tentu mempengaruhi posisi perempuan di lingkungan keluarga, bahkan bisa terhindar dari posisi ter-subordinasi-kan oleh laki-laki.

Perempuan Bali juga bergairah sebagai pekerja rumahan yang dipadukan pada kegiatan domestik. Fenomena ini disebabkan oleh latar belakang perempuan Bali untuk memanfaatkan waktu luang serta adanya struktur sosial dan infrastruktur material sebagai penguatan terhadap etos kerja. Dalam kearifan lokal Bali, etos kerja telah digubah dalam karya berbahasa Bali yang bernama *Salampah Laku* (Suastika 2006). Dalam karya tersebut dinyatakan bahwa etos kerja merupakan usaha maksimal dan sadar dalam bekerja sebagai perwujudan panggilan suci. Selain itu, perempuan Bali menganggap kerja adalah *yadnya* sebagai upaya peningkatan kualitas diri.

2. Kekuasaan Perempuan Bali dalam Pengelolaan Pariwisata

Dahrendorf (1986) menyatakan bahwa setiap hubungan sosial, termasuk hubungan suami istri dalam keluarga terdapat aspek pemilikan kekuasaan, artinya dalam hubungan sosial tersebut ada aktor yang memiliki kekuasaan yang lebih besar, sehingga dia mampu mengarahkan perilaku aktor lainnya sesuai

dengan apa yang diinginkannya. Lebih lanjut Burns, Baumgartner dan Devilie (1988:193) menyatakan besar kecilnya kekuasaan yang dimiliki seseorang antara lain tercermin pada hubungan perempuan dan laki-laki dalam keluarga, yakni dalam bentuk tindakan menyusun atau mengatur kondisi-kondisi, mengatur masukan dan proses-proses pengambilan keputusan serta tindakan dari pelaku sosial lainnya.

Berkenaan dengan pengambilan keputusan yang merupakan cerminan kekuasaan dalam keluarga, pengambilan keputusan pada keluarga-keluarga ada berbagai variasi, yakni pengambilan keputusan hanya oleh istri; pengambilan keputusan hanya oleh suami; pengambilan keputusan oleh suami dan istri bersama, di mana istri lebih dominan; pengambilan keputusan oleh suami dan istri bersama, di mana suami yang dominan; dan pengambilan keputusan bersama oleh suami dan istri yang setara.

Dalam konteks pengelolaan pariwisata di Bali, pengambilan keputusan lebih didominasi oleh laki-laki. Hal ini selain disebabkan oleh besarnya jumlah pekerja laki-laki dalam pengelolaan pariwisata di Bali, juga diakibatkan oleh adanya stereotip bahwa perempuan Bali belum mampu secara mandiri untuk mengambil sebuah keputusan terkait pengelolaan pariwisata di Bali. Kondisi ini menyebabkan perempuan Bali akan berkompromi terhadap keputusan yang dihasilkan, dengan tujuan agar tetap mampu mendukung pengembangan pariwisata. Adanya kompromi terhadap sebuah keputusan dalam pengelolaan pariwisata di Bali merupakan sebuah dinamika, artinya pada saat mereka menelorkan keputusan, selalu ada kemungkinan bahwa terdapat satu pihak yang akan memberikan perlawanan terhadap pihak lainnya. Oleh karena itu, agar proses kekuasaan bisa berjalan dengan baik, perempuan Bali bisa berkonvergensi, yakni bermufakat sehingga perbedaan yang ada terjembatani yang akhirnya membawa mereka ke arah satu haluan dalam memilih berbagai alternatif guna mewujudkan keberhasilan dalam pengelolaan pariwisata di Bali.

Lemahnya kekuasaan perempuan Bali dalam pengambilan keputusan pada pengelolaan pariwisata di Bali juga diakibatkan oleh faktor rendahnya

pendidikan perempuan Bali dibandingkan dengan pendidikan laki-laki Bali yang bekerja pada sektor pariwisata. Sedangkan menurut Karmilah (2013) tingkat kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan tidak dapat diabaikan begitu saja walaupun tingkat pendidikan perempuan umumnya lebih rendah dari pria. Namun demikian, agar tidak terjadi konflik dalam pengambilan sebuah keputusan terkait pengelolaan pariwisata, penelitian ini menemukan bahwa perempuan Bali lebih menaruh rasa hormat kepada laki-laki sebagai *purusa* (garis keturunan berdasarkan pihak laki-laki) dan sebagai kepala keluarga. Ini berarti pengambilan keputusan dalam pengelolaan pariwisata masih dipengaruhi oleh kultur atau budaya. Dalam konteks manajemen modern, budaya merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi suatu level kekuasaan dalam pengambilan sebuah keputusan.

3. Ketidakadilan Terhadap Perempuan Bali Dalam Pengelolaan Pariwisata

Pengaruh pariwisata dalam proses pembangunan memperlihatkan bahwa pariwisata memperluas kesempatan perempuan berperan dalam bidang ekonomi, sosial bahkan politik. Lebih lanjut menurut Prasiasa (2022) pariwisata juga dapat mengubah susunan kekuasaan dan nilai-nilai pada suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang berwujud dominasi sebagai pelaksanaan dari kekuasaan.

Pariwisata sebagai perjalanan dengan memanfaatkan waktu luang (*leisure time*) dan berbagai industri yang mendukungnya dibentuk oleh hubungan antara *host* dan *guest* dengan berbagai macam karakteristik seperti gender, kelas, usia, etnis dan ras serta negara. Pariwisata dan hubungan sosial akhir-akhir ini juga kurang memperhatikan isu gender secara substansial. Selain itu beberapa kajian juga telah menemukan bahwa pariwisata mampu membawa dampak bagi perluasan peluang kerja, berupa mempertegas pembagian kerja gender atau mengubahnya sesuai dengan munculnya peluang kerja atau penghasilan baru.

Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan pariwisata di Bali juga mempertimbangkan peran ganda perempuan, tujuannya agar tidak menimbulkan konflik antara peran di aras domestik dengan peran di aras publik dari perempuan Bali. Dilain pihak, menurut Mardani (1995:10) perempuan Bali

ingin menciptakan agar peran ganda yang dijalani tidak mengurangi beban tradisional atau sekurang-kurangnya menciptakan modifikasi dalam kehidupan sebagai perempuan tradisional.

Dari sisi pertumbuhan, baik untuk angkatan kerja maupun dari lapangan usahanya, pertumbuhan (*growth*) tenaga kerja perempuan Bali lebih baik dari tenaga kerja laki-laki Bali. Dengan tidak mengecilkan makna pertumbuhan tersebut, memang dari sisi *cultural studies* pendekatan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan dianggap gagal menjalankan perannya. Kondisi kegagalan tersebut antara lain ditandai dengan timbulnya masalah terhadap tenaga kerja perempuan Bali di bidang pariwisata berupa marginalisasi di berbagai proyek kepariwisataan dan pengembangan masyarakat, marginalisasi perempuan di sektor publik pariwisata yang berorientasi kekuasaan dan berbagai stereotipe negatif yang sering menimpa perempuan Bali. Semua masalah tersebut pada akhirnya bermuara pada ketidakadilan terhadap pekerja perempuan Bali pada sektor pariwisata di Bali.

Dengan mengesampingkan latar belakang pendidikan pekerja perempuan Bali, kiranya semua masalah yang ditimbulkan oleh kegagalan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan berdampak pada pekerja perempuan Bali dalam pengelolaan pariwisata di Bali harus disikapi sebagai kekurangmampuan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terkait dengan ketenagakerjaan bidang pariwisata di Bali. Pemangku kepentingan tersebut kurang memperhatikan aspek budaya dari pekerja perempuan Bali, sehingga perempuan Bali hanya dijadikan mesin uang dari kapitalis yang diwakili oleh pengusaha, serta hegemoni pemerintah terhadap para pekerja perempuan Bali di sektor pariwisata (baik pekerja formal maupun informal) untuk mau mengikuti dan mentaati berbagai aturan yang ditetapkan tanpa sebelumnya mengajak pekerja kaum perempuan untuk bermusyawarah tentang berbagai aturan tersebut.

Bentuk ketidakadilan terhadap perempuan Bali dalam pengelolaan pariwisata di Bali berupa perlakuan tidak adil, karena kesempatannya

mengakses pekerjaan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Marginalisasi terhadap perempuan Bali dalam pengelolaan pariwisata di Bali juga berupa proses peminggiran yang mengakibatkan kemiskinan. Bentuk marginalisasi yang paling kentara adalah perempuan Bali tidak banyak terlibat pada pekerjaan-pekerjaan pengelolaan pariwisata (pada level manajerial), tetapi hanya dominan dalam satu pekerjaan yaitu penjaga kios/warung yang menjual makanan. Dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan pariwisata, termasuk di desa asal perempuan Bali tersebut, mereka tidak dilibatkan serta pemikiran perempuan seakan tidak didengar. Temuan ini juga diperkuat oleh Swain (1995) yang menyatakan bahwa perempuan yang bekerja di sektor pariwisata menghadapi hambatan dalam mencapai posisi strategis untuk sebuah level pekerjaan bidang jasa kepariwisataan.

Ketidakadilan yang terjadi pada perempuan Bali dalam pengelolaan pariwisata di Bali diakibatkan oleh beberapa faktor, *pertama*, kurangnya dukungan *stakeholders* untuk melakukan pemberdayaan perempuan serta kurangnya pendampingan dari *stakeholders* dalam mengubah pola pikir perempuan agar memiliki kemauan terlibat pada ranah publik. Akibatnya perempuan kurang berdaya dalam penghasilan ekonomi karena keterbatasan pekerjaan yang dapat dijangkau termasuk keterbatasan level jabatan yang bisa dijangkau; *kedua*, pada beberapa daerah, perempuan Bali mengalami subordinasi yaitu sikap dan tindakan masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki; *ketiga*, hasil penelitian ini juga menemukan bahwa perempuan Bali masih mendapatkan stereotipe atau pemberian label negatif yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah. Pelabelan negatif tersebut antara lain berupa persepsi bahwa perempuan Bali adalah makhluk lemah yang tidak memiliki tenaga sekuat laki-laki, sehingga tidak dipercaya bekerja pada jenis pekerjaan yang membutuhkan tenaga lebih seperti *naturalist guide* dan *tour guide*. Mereka juga dipandang sebagai pendamping suami yang tidak perlu memiliki jabatan-jabatan strategi; *keempat*, kekerasan atau *violence* yang merupakan bentuk perilaku baik verbal maupun

non-verbal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya. Bentuk kekerasan yang diterima perempuan Bali seperti ini merupakan bentuk kekerasan simbolik; *kelima*, beban ganda atau beban pekerjaan yang diterima oleh salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Selain bekerja, perempuan di Bali juga memiliki tanggungjawab sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengurus keperluan anak dan suami, memasak, mencuci pakaian, serta melakukan pekerjaan rumah lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, belum ada pembagian kerja secara adil antara istri dan suami dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut, beban kerja justru diberikan kepada istri, sedangkan suami lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja. Hal ini karena laki-laki memiliki kesempatan lebih luas dalam mengakses pekerjaan, sehingga mereka lebih banyak menggunakan waktunya untuk bekerja.

D. Penutup

Pariwisata mengubah susunan kekuasaan dan nilai-nilai pada pengelolaan pariwisata di Bali, yang berwujud dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam beberapa jenis pekerjaan di bidang pariwisata. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa di beberapa jenis pekerjaan pada sektor pariwisata di Bali, perempuan lebih berperan dalam perubahan kegiatan ekonomi yang dibawa pariwisata dan mendapat keuntungan dari perubahan tersebut dibandingkan pria. Keterlibatan perempuan dalam pariwisata perlu mempertimbangkan peran ganda perempuan agar tidak menimbulkan konflik, dengan cara menciptakan modifikasi dalam kehidupan sebagai perempuan tradisional Bali. Hal tersebut diperlukan karena marginalisasi dan subordinasi perempuan pada sektor pariwisata di Bali yang berorientasi pada kekuasaan, bermuara pada ketidakadilan terhadap perempuan Bali yang bekerja pada sektor pariwisata di Bali.

Dalam jangka pendek perlu digalakkan kembali berbagai organisasi perempuan yang telah ada; kaum perempuan mulai memberi pesan tegas akan

penolakan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual; memberi pelajaran kepada kaum perempuan tentang berbagai teknis praktis menghentikan kekerasan, pemerkosaan dan pelecehan; lebih aktif menyampaikan *uneg-uneg* perempuan pada kolom pembaca di media massa cetak seperti koran; dan melancarkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan. Dalam jangka panjang perlu dilakukan peperangan terhadap berbagai hambatan di masyarakat yang bersifat ideologi, antara lain dengan melakukan kesadaran kritis dan pendidikan umum kepada masyarakat untuk menghentikan berbagai bentuk ketidakadilan gender dengan berbagai langkah pendukungnya, antara lain dengan melakukan berbagai studi yang terkait dengan ketidakadilan gender. Hasilnya dapat dijadikan bahan dalam rangka melakukan advokasi yang terkait dengan ketidakadilan gender.

Daftar Pustaka

- Andani, Faradilla. 2017. "Peran Perempuan Dalam Kegiatan Pariwisata Di Kampung Wisata Tebing Tinggi Okura Kota Pekanbaru." *Jurnal Fisip* 4(3):1689-99.
- Artadi, I. Ketut. 1993. *Manusia Bali*. Denpasar: Bali Post.
- Burn, Tom R., Thomas Baumgartner, and Philippe Devilie. 1988. *Manusia, Keputusan, Masyarakat Teori Dinamika Antara Aktor Dan Sistem Untuk Ilmuwan Sosial*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Couteau, Jean, and Usadi Wiryatnaya. 1994. *Bali Di Persimpangan Jalan 1,2*. Denpasar: Nusadata Indobudaya.
- Cukier, Judie, Joanne Norris, and Geoffrey Wall. 1996. "The Involvement of Women in the Tourism Industry of Bali, Indonesia." *Journal of Development Studies* 33(2):248-70. doi: 10.1080/00220389608422465.
- Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik Dan Konflik Dalam Masyarakat Industri Sebuah Analisa Kritis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darmayanti, Arni, and Gede Budarsa. 2021. "Peran Ganda Perempuan Bali Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 8(1):1. doi: 10.24036/scs.v8i1.209.
- Fakih, Monsour. 1996. *Menggeser Konsepsi Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hidayati, Nurul. 2015. "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)." *Jurnal Muwazah* 7(2):108-19. doi: 10.28918/MUWAZAH.V7I2.516.
- Karmila, Mila. 2013. "Peran Ganda Perempuan Di Lingkungan Pariwisata Bandungan, Jawa Tengah." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 6(1):129-58. doi: 10.21043/PALASTREN.V6I1.981.
- Lury, C. 1998. *Budaya Konsumen*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mardani. 1995. *Perempuan Dan Pembangunan Pariwisata Budaya*. Yogyakarta.
- Moore, Henrietta L. 1994. *A Passion for Differences: Assay in Anthropology and Gender*. Cambridge: Polity Press.
- Oka Prasiasa, Dewa Putu. 2022. "Pengembangan Daerah Wisata Dalam Bingkai Politik Pariwisata." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 3(1):55-68. doi: 10.22373/jsai.v3i1.1658.
- Onwueg, A. J., and R. Frels. 2016. *Methodology of The Literature Review. In: Seven Steps to a Comprehensive Literature Review A Multimodal & Cultural Approach*. London: Sage Publication Ltd.
- Piliang, Y. A. 1998. *Dunia Yang Dilipat Realitas Menjelang Milenium Ketiga Dan Matinya Posmodernisme*. Bandung: Mizan.
- Ratna, Kutha. 2005. *Sastra Dan Cultural Studies Representasi Fiksi Dan Fakta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosaldo, Michelle., and L. Lhamphere. 1974. *Woman, Culture and Society*. California: Stanford University Press.
- Suastika. 2006. "Etos Kerja Wanita Bali: Refleksi Nilai Karya Sastra Dan Aktualisasinya Dalam Kehidupan Masyarakat." Pp. 279-316. in *Bali Bangkit Bali Kembali. Kerjasama Departemen Kebudayaan dan*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Subadra, I. N. 2008. "Perempuan Bali Dalam Pariwisata | Bali Tourism Watch." Retrieved March 20, 2023 (<https://subadra.wordpress.com/2008/06/23/bali-artikel-pariwisata-peran-perempuan-emansipasi-wanita-bali-wisata-jurnal-ilmiah-karya-tulis-pemberdayaan-perempuan-bali-kini/>).
- Swain, Margaret Byrne. 1995. "Gender in Tourism." *Annals of Tourism Research* 22(2):247-66. doi: 10.1016/0160-7383(94)00095-6.
- Syafruddin, Syafruddin, Hairil Wadi, and Suud Suud. 2020. "Industri Pariwisata Dan Mobilitas Pekerjaan Perempuan Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kuta Lombok." *Jurnal Society* 8(1):136-46.
- Yanthy, Putu Sucita. 2016. "Kontribusi Perempuan Dalam Mengangkat Kuliner Lokal Untuk Mendukung Pariwisata Bali." Universitas Udayana.